JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063- 3664
Vol. 2, No. 4, 2025

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN DI DESA PALIMBANGAN GUSTI KECAMATAN HAUR GADING KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Siti Rahmah[1], Sugianor[2], Agus Surya Dharma[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
Email : strhmh90@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi merupakan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Adapun fenomena masalahnya yaitu, sebagian masyarakat masih buang air besar sembarangan di sungai karena faktor kebiasaan masyarakat sejak dulu dan belum di bangun jamban sehat di rumah, sebagian masyarakat belum diberikan fasilitas pembangunan jamban sehat yang merupakan program dari pemerintah daerah untuk mengubah perilaku kebiasaan BABS sembarangan, namun mereka masih buang air besar sembarangan, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak buang Air besar sembarangan disungai dan pentingnya berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di kehidupan sehari-hari. persepsi mereka tahu nya hanya kenyamanan dan kebiasaan mereka sejak dulu. Kondisi ini bertolak belakang dengan semangat regulasi yang mendorong terbentuknya lingkungan bersanitasi baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan di Desa Palimbangan Gusti Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara belum terimplementasi. dari 6 variabel dan 13 indikator Implementasi Van Meter & Van Horn yaitu, ukuran kebijakan dalam aspek cukupan wilayah, target populasi, dan jangka waktu cukup terimplementasi, tujuan kebijakan dalam persentase penurunan babs dan perbaikan kesehatan masyarakat cukup terimplementasi, sumber daya manusia yang kurang terimplementasi, sumber daya finansial kurang terimplementasi, organisasi formal kurang terimplementasi, organisasi informal cukup terimplementasi, penerima dari pelaksana sudah terimplementasi , penerima dari masyarakat kurang terimplementasi, koordinasi antar organisasi kurang terimplementasi, komunikasi antar petugas dan masyarakat masih kurang terimplementasi, lingkungan sosial yaitu dukungan lingkungan sosial kurang terimplementasi, ekonomi yaitu dukungan lingkungan ekonomi kurang terimplementasi, dan lingkungan politik yaitu dukungan dari lingkungan politik cukup terimplementasi. Ada faktor pendorong terlaksanannya kebijakan stop babs pada masyarakat desa palimbangan gusti untuk mengurangi angka babs yang disosialisasikan melalui program posyandu dan ada faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, Kurangnya Pelatihan Lanjutan dan Pendalaman Materi bagi Petugas, Tidak ada penegakan sanksi yang tegas terhadap masyarakat,Tingkat Kecukupan Ekonomi yang Berbeda, dan Kurangnya Sarana dan Prasarana yang di berikan kepada masyarakat. Penulis menyarankan agar pemerintah daerah lebih serius memperkuat pengawasan dan pendanaan program STBM, meningkatkan kualitas komunikasi lintas sektoral, serta melibatkan tokoh masyarakat dalam kampanye PHBS. Perlu juga dilakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan untuk memastikan pencapaian target Desa Stop BABS secara berkelanjutan.

Kata kunci: Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan

ABSTRACT

Implementation is a success in achieving the goals that have been set. The problem phenomenon is, some people still defecate carelessly in the river because of community habits since long ago and have not built healthy latrines at home, some people have not been given healthy latrines construction facilities which are a program from the local government to change the behavior of open defecation habits, but they still defecate carelessly, and lack of public awareness of the impact of open defecation in the river and the importance of clean and healthy living behavior (PHBS) in everyday life. their perception knows only comfort and their habits since long ago. This condition is contrary to the spirit of regulations that encourage

the formation of a good sanitation environment. The results of the study show that the Implementation of the Policy in Palimbangan Gusti Village, Haur Gading District, Hulu Sungai Utara Regency has not been implemented. of 6 variables and 13 indicators of the Implementation of Van Meter & Van Horn, namely, the size of the policy in terms of area adequacy, population targets, and timeframe is sufficiently implemented, the objectives of the policy in terms of the percentage of reducing defecation and improving public health are sufficiently implemented, human resources are less implemented, financial resources are less implemented, formal organizations are less implemented, informal organizations are sufficiently implemented, recipients from implementers have been implemented, recipients from the community are less implemented, coordination between organizations is less implemented, communication between officers and the community is still less implemented, the social environment, namely social environmental support is less implemented, the economy, namely economic environmental support is less implemented, and the political environment, namely support from the political environment is sufficiently implemented. There are driving factors for the implementation of the stop babs policy in the Palimbangan Gusti village community to reduce the number of babs socialized through the Posyandu program and there are main inhibiting factors in the implementation of the policy Low level of public awareness, Lack of Advanced Training and Material In-depth for Officers, No strict enforcement of sanctions against the community, Different Levels of Economic Adequacy, and Lack of Facilities and Infrastructure provided to the community. The author suggests that local governments be more serious in strengthening supervision and funding of the STBM program, improving the quality of cross-sectoral communication, and involving community leaders in the PHBS campaign. It is also necessary to conduct periodic evaluations of the effectiveness of the policy to ensure the sustainable achievement of the target of Open Defecation Free Villages. .

Keywords: *Stop Open Defecation Movement*

PENDAHULUAN

Pada masyarakat desa Palimbangan Gusti masih kerap dijumpai terutama yang dekat dengan sungai masih banyak yang berperilaku tidak sehat dengan buang besar 4 disungai, pekarangan, rumah atau tempat-tempat yang tidak selayaknya salah satu penyebab masyarakat melakukan buang air besar di sungai adalah rendahnya motivasi masyarakat untuk berperilaku hidup bersih, sehat dan sebagian masyarakat belum memiliki fasilitas buang air besar yang layak seperti MCK (Mandi Cuci Kakus), sehingga masyarakat mengguanakan sungai untuk buang air besar, Kebiasaan seperti ini sangat merugikan kesehatan masyarakat karena banyak warga yang melakukan aktivitas disungai seperti mandi dan mencuci baju ketika aliran sungai mengalir sebenarnya masyarakat sadar arti pentingnya memiliki MCK (Mandi Cuci Kakus).

Masalah kesehatan lingkungan cenderung timbul karena kurangannya kesadaran masyarakat yang ingin hidup sehat. Pada dasarnya penyakit terjadi karena adanya interaksi antara berbagai elemen yang saling mempengaruhi lingkungan merupakan faktor yang berhubungan dengan kematian ataupun resiko untuk terjadinya waktu penyakit kelainan yang disebabkan faktor lingkungan. Karena adanya interaksi antara komunitas manusia dengan lingkungan yang berimbas pada Kesehatan masyarakat, masalah lingkungan hidup benarnya sudah ada sejak dulu.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) awal yang kemudian telah ditemukan fenomena-fenomena atau permasalahan yang ditemui, yaitu : Sebagian Masyarakat masih buang air besar sembarangan di sungai karena faktor kebiasaan masyarakat sejak dulu dan belum di bangun jamban sehat di rumah, Sebagian masyarakat belum diberikan fasilitas pembangunan jamban sehat yang merupakan program dari pemerintah daerah untuk mengubah perilaku kebiasaan BABS Sembarangan, namun mereka masih buang air besar sembarangan dan Kurangnya Kesadaran masyarakat terhadap Dampak Buang Air Besar Sembarangan disungai dan pentingnya berperilaku

hidup bersih dan Sehat (PHBS) di kehidupan Sehari-hari. Persepsi mereka tahu nya hanya kenyamanan dan kebiasaan mereka sejak dulu.

Penelitian terdahulu Moh. Fajar Noorrahman. Jurnal. 2020. Penelitian dengan judul *"Efektivitas Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Melalui Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Desa Pawalutan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara"* dilakukan pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik purposive sampling**.** Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program STBM belum optimal karena sebagian masyarakat masih melakukan BABS akibat tidak memiliki jamban sehat di rumah. Selain itu, masih terdapat keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai dampak negatif BABS serta rendahnya kepuasan masyarakat terhadap program, terutama karena dana pembangunan jamban sehat diberikan secara bertahap (Noorrahman, 2020).

Maria Sophie Muaja, Odi Roni Pinontoan, & Oksfriani Jufri Sumampouw (2020) Penelitian berjudul *"Peran Pemerintah dalam Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Stop Buang Air Besar Sembarangan"* dilaksanakan pada bulan April–Mei 2020 di Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa, oleh Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan 5 informan yang ditentukan secara purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, menggunakan instrumen pedoman wawancara, perekam suara, dan kamera, kemudian dianalisis dengan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi STBM belum didukung oleh inisiatif masyarakat desa. Tidak ada usulan kegiatan dalam musyawarah desa untuk mengatasi masalah BABS, dan masyarakat belum memanfaatkan sumber daya secara kolektif. Dari sisi ukuran dan tujuan program, pemahaman pelaksana cukup baik, namun pelaksanaan masih terbatas pada langkah pemicuan saja. Sementara itu, aspek sumber daya dan karakteristik pelaksana sudah berjalan, tetapi aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik masih sangat rendah. (Maria, Muaja and Sumampouw, 2020)

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2016:133–136), implementasi kebijakan adalah proses linier dari keputusan politik hingga kinerja kebijakan publik. Keberhasilannya dipengaruhi enam variabel. Pertama, ukuran dan tujuan kebijakan harus realistis dengan kondisi sosial budaya. Kedua, sumber daya manusia, finansial, dan waktu sangat menentukan. Ketiga, karakteristik agen pelaksana harus sesuai tuntutan kebijakan. Keempat, sikap pelaksana berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Kelima, komunikasi dan koordinasi antar-organisasi menjadi syarat utama. Keenam, lingkungan eksternal (ekonomi, sosial, politik) harus kondusif agar implementasi berjalan efektif. (Agustino, 2016)

METODE

Metode penelitian yang dipilih penulis adalah menggunakan pendekatan yang bersifat Kualitatif, pendekatan kualitatif yang bertujuan ingin memberikan gambaran secara menyeluruh dan sitematis dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan gejala-gejala lain dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Secara keseluruhan, informan yang dilibatkan berjumlah empat belas orang dengan menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Uji kredibilitas data dengan perpanjangan pengamatan,

peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. (Sugiyono, 2022)

PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan Di Desa Palimbangan Gusti Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Utara

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Variabel ini mengkaji sejauh mana kebijakan Implementasi Kebijakan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Palimbangan Gusti Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara telah dirumuskan dan ditetapkan dengan jelas.

a. Ukuran Kebijakan

Meliputi aspek-aspek seperti cakupan wilayah, target populasi, dan jangka waktu pelaksanaan kebijakan. Seberapa luas kebijakan ini diterapkan. Berapa banyak penduduk yang menjadi target. Berapa lama program ini direncanakan berlangsung.

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan yang di lakukan di lapangan terkait ukuran kebijakan cukup terimplementasi dari pelaksanaan kebijakan, mereka menyatakan bahwa Ukuran kebijakan ini memang menargetkan seluruh wilayah desa palimbangan gusti, namun dalam pelaksanaannya kami memprioritaskan bedasarkan data kemiskinan. Untuk target populasi bedasarkan data awal 2024-2025 kami mengidenfikasi ada 99 kepala keluarga yang tidak memiliki wc dan kami sudah berhasil merealistiskan untuk 20 kepala keluarga masih ada 79 kepala keluarga lagi yang menhadi target kami hingga akhir tahun 2025. Dengan adanya kebijakan ini pemerintahnya sudah berkomitmen untuk semaksimal mungkin agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang di lakukan peneliti di lapangan dapat di simpulkan bahwa dalam implementasi pelaksanaan kebijakan ini dari tingkat pelaksana cukup terimplementasi realistis dengan sosio kultur cakupan wilayah seluruh desa, dengan prioritas wilayah RT 5 dan RT 6, target populasi 99 kepala keluarga tanpa WC 79 KK masih dalam proses intervensi, dan waktu pelaksanaan: 2 tahun (2024–2025) dengan fase pendataan, implementasi, dan evaluasi. Dengan komitmen para pemangku kepentingan, program ini diharapkan dapat berhasil menjadikan seluruh Desa Palimbangan Gusti bebas dari praktik buang air besar sembarangan secara menyeluruh hingga akhir tahun 2025.kepala desa menargetkan seluruh wilayah desa palimbangan gusti sudah ODF. Kami berharap program ini bisa berlanjut di perpanjang tujuannya agar masyarakat desa palimbangan gusti memiliki akses sanitasi yang layak.

b. Tujuan Kebijakan

Berfokus pada tujuan yang ingin dicapai oleh Implementasi Kebijakan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan Di Desa Palimbangan Gusti Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, misalnya, persentase penurunan angka BABS, peningkatan akses jamban, dan perbaikan kesehatan masyarakat.

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan yang di lakukan di lapangan terkait tujuan kebijakan mereka menyatakan bahwa tujuan pelaksanaan kebijakan ini sudah cukup terimplementasi untuk mengurangi jumlah masyarakat yang masih melakukan buang air besar di sungai. Jika awalnya 30% warga masih BABS, maka dengan

penerapan program stop BABS, angka tersebut di harapkan turun menjadi di bawah 10%, yaitu mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan dan sanitasi. Ini bukan hanya tentang larangan membuang kotoran sembarangan, tetapi juga tentang membangun kesadaran akan pentingnya kesehatan lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang di lakukan oleh peneliti di lapangan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan ini memang cukup terimplementasi dengan sosio kultur pada tingkat pelaksana kebijakan, karena tujuan utama kebijakan ini menjadikan desa palimbangan gusti menjadi 100% bebas dari buang air besar sembarangan dan memperbaiki Kesehatan masyarakat yang mana sebelumnya Kesehatan masyarakat desa palimbangan gusti menurun karena dulu nya ada anak – anak yang meninggal akibat buruk nya sanitasi, kami berharap ada penurunan dalam 1 tahun kedepan berkat adanya program ini.

2. Sumber Daya

Variabel ini menganalisis ketersediaan sumber daya yang mendukung pelaksanaan Implementasi Kebijakan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Palimbangan Gusti Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan dan pengetahuan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah di tetapkan dan harus di manfaatkan sesuai ketentuan dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

Hasil wawancara terkait sumber daya manusia (SDM) dalam program Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Palimbangan Gusti menunjukkan hasil yang Cukup terimplementasi. Meskipun jumlah petugas dinilai mencukupi secara umum, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Kinerja petugas masih belum merata, dengan beberapa petugas yang kurang aktif dan proaktif, serta koordinasi antar petugas dan dengan aparat desa yang masih perlu ditingkatkan.

Kesimpulannya, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa upaya penanggulangan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di lokasi penelitian Kurang terimplementasi .Meskipun jumlah petugas secara umum dinilai mencukupi, terdapat kendala dalam kinerja yang belum merata, dengan beberapa petugas yang kurang aktif dan proaktif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat semangat gotong royong di antara masyarakat, kesenjangan dalam pelaksanaan program dan komitmen petugas masih perlu diperbaiki.

b. Sumber Daya Fasilitas

Meliputi anggaran yang dialokasikan untuk program, sumber pendanaan, dan efisiensi penggunaan anggaran. Apakah anggaran yang tersedia cukup. Apakah pengalokasian anggaran efektif dan efisien.

Hasil Hasil wawancara yaitu kurang terimplementasi hal tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran untuk Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Palimbangan Gusti masih sangat terbatas dan menjadi kendala utama dalam mencapai tujuan program. Meskipun terdapat beberapa sumber dana, seperti bantuan 20 WC gratis dari PU, jumlahnya jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh

masyarakat yang masih melakukan buang air besar sembarangan, terutama di RT 6. Ketidakmerataan distribusi dana dan ketergantungan sebagian masyarakat pada bantuan WC gratis juga menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Untuk keberhasilan program ini, diperlukan peningkatan signifikan anggaran, strategi yang lebih komprehensif, dan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah desa, Puskesmas, dan lembaga terkait lainnya, serta keterlibatan aktif masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan anggaran juga penting untuk membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

Kesimpulan secara keseluruhan, baik hasil wawancara maupun observasi menunjukkan bahwa program Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Desa Palimbangan Gusti kurang terimplementasi karena keterbatasan anggaran. Keterbatasan ini bukan hanya disebabkan oleh jumlah dana yang minim, tetapi juga karena adanya prioritas kebutuhan lain di desa yang juga memerlukan pendanaan. Meskipun ada bantuan eksternal, dana yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sanitasi seluruh masyarakat dan mengakibatkan ketidakmerataan akses serta ketergantungan pada bantuan. Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan strategi penganggaran yang lebih terencana dan terintegrasi, eksplorasi sumber pendanaan tambahan, serta kerjasama yang lebih erat antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah desa, Puskesmas, dan masyarakat. Transparansi dan partisipasi masyarakat juga sangat penting untuk keberhasilan program jangka panjang.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Variabel ini mengkaji peran dan karakteristik lembaga atau individu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Implementasi Kebijakan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Palimbangan Gusti Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.

a. Bentuk Organisasi Formal

Organisasi formal adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang mengikat diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional. Tingkat organisasi pemerintahan memiliki peran yang sama pentingnya dan secara organisasi yang siap harus bekerja sama dalam suatu kebijakan yang di buat.

Hasil wawancara yaitu kurang terimplementasi, meskipun terdapat kerjasama yang baik antar berbagai pihak terkait, implementasi Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Palimbangan Gusti menunjukkan hasil yang kurang terimplementasi. Ketiadaan organisasi formal yang terstruktur untuk program ini menjadi kendala utama. Meskipun kerjasama antar pemerintah desa, Puskesmas, kader kesehatan, dan organisasi masyarakat telah berjalan, hal tersebut belum cukup efektif untuk mencapai tujuan program secara menyeluruh. Kurangnya pendampingan warga dan ketidakmerataan akses informasi serta bantuan menjadi beberapa faktor penyebabnya. Kesimpulannya, untuk mencapai hasil yang lebih baik, diperlukan pembentukan organisasi formal yang terstruktur dan terkoordinasi untuk program ini.

Kesimpulan dari hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa program Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Desa Palimbangan Gusti

kurang terimplementasi karena tidak adanya organisasi formal yang terstruktur. Meskipun terdapat kerjasama yang baik antara pemerintah desa, Puskesmas, kader kesehatan, dan organisasi masyarakat seperti Posyandu, implementasi program ini masih kurang optimal dalam mengurangi angka BABS. Ketiadaan organisasi formal mengakibatkan kurangnya koordinasi terpusat, pendampingan yang tidak intensif, dan ketidakmerataan akses informasi serta bantuan. Oleh karena itu, sangat diperlukan pembentukan organisasi formal yang terstruktur untuk meningkatkan implementasi program dan memastikan tercapainya tujuan secara menyeluruh. Organisasi ini akan memfasilitasi koordinasi yang lebih baik, memberikan pendampingan yang lebih terarah kepada masyarakat, dan memastikan akses informasi yang merata, yang pada akhirnya dapat mengurangi angka BABS di desa tersebut secara berkelanjutan.

b. Bentuk Organisasi Informal

Menganalisis peran kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, dan jaringan sosial dalam mendukung pelaksanaan program. Bagaimana peran organisasi informal dalam mendukung program.

Hasil wawancara peneliti dengan informan yang di lakukan di lapangan yaitu cukup terimplementasi, mereka menyatakan bahwa belum ada keterlibatan organisasi informal pelaksana kebijakan ini namun organisasi pemuda dalam mendukung Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Palimbangan Gusti. Meskipun beberapa pihak mengaku kurang mengetahui secara detail keterlibatan kelompok masyarakat, semangat kebersamaan dan peran tokoh masyarakat seperti ketua RT terbukti efektif dalam mendorong perubahan perilaku.

Kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa terdapat kondisi yang cukup terimplementasi dalam mendukung Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Palimbangan Gusti. Peran organisasi informal, seperti PKK, kader Posyandu, dan organisasi pemuda, sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya BABS dan pentingnya sanitasi yang baik. Meskipun ada beberapa pihak yang mengaku kurang mengetahui keterlibatan kelompok masyarakat, semangat kebersamaan dan dukungan dari tokoh masyarakat, seperti ketua RT, terbukti efektif dalam mendorong perubahan perilaku di masyarakat.

4. Variabel Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana

Variabel ini mengukur penerimaan dan dukungan dari para pelaksana program terhadap Implementasi Kebijakan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Palimbangan Gusti Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.

a. Penerimaan Dari Pelaksana

Apabila pelaksana bisa mengarahkan maka pelaksanaan kebijakan akan berjalan bagus serta adanya keterlibatan dari tokoh masyarakat dalam memberikan pandangan dan motivasi, namun tidak semua masyarakat yang ikut terlibat benar-benar melaksanakan kebijakan dengan baik.

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan yang di lakukan dilapangan terkait penerimaan dari pelaksana dari pelaksanaan kebijakan tersebut sudah terimplementasi mereka menyatakan bahwa penerimaan dari pelaksana sangat menerima dengan

adanya kebijakan tersebut karena untuk mengurangi masyarkat agar tidak ada lagi yang membuang air besar sembarangan di sungai.

Dari hasil observasi yang di lakukan peneliti di lapangan dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah ini bahwa untuk penerimaan dari pelaksana cukup terimplementasi di lihat dari pelaksana yang masih kurang berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan ini. peneliti melihat bahwa pelaksana hanya sekedar memberikan teguran saja kepada masyarakat.

Kesimpulan Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang di lakukan oleh peneliti di lapangan dapat di simpulkan bahwa mengenai penerimaan dari pelaksana dalam pengimplementasian pelaksanaan kebijakan cukup terimplementasi dari respon pelaksana itu sendiri, banyak dari pelaksana yang mendukung terlaksananya kebijakan ini. Tetapi untuk melaksanakan kebijakan ini masyarakat masih rendah tingkat kesadaran dan kurang ikut serta dari masyarakat itu sendiri.

b. Penerimaan Dari Masyarakat

Meliputi tingkat kesadaran, partisipasi, dan dukungan masyarakat terhadap program Kebijakan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan Di Desa Palimbangan Gusti Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara. Seberapa besar penerimaan masyarakat terhadap program.

Hasil wawancara peneliti dengan informan yang di lakukan di lapangan terkait penerima dari masyarakat yaitu kurang terimplementasi terhadap kebijakan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Desa Palimbangan Gusti. Meskipun terdapat dukungan dari beberapa pihak, terdapat pula kendala seperti kebutuhan akan dukungan logistik yang lebih memadai, dan ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dengan kondisi lokal. Pendekatan yang lebih komprehensif dan partisipatif, yang mempertimbangkan kondisi spesifik desa, sangat penting untuk keberhasilan program.

Kesimpulan dari hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan program Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Desa Palimbangan Gusti kurang terimplementasi karena masih kurang berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan ini. peneliti melihat, masyarakat memang menerima dan mendukung tetapi untuk melaksanakan kebijakan ini masyarakat masih rendah tingkat kesadaran dan kurang ikut serta sehingga mengakibatkan daya dukung dari Masyarakat masih lemah.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Variabel ini menganalisis bagaimana komunikasi dan koordinasi antar lembaga dan petugas dalam pelaksanaan program Implementasi Kebijakan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan Di Desa Palimbangan Gusti Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.

a. Koordinasi Antar Organisasi

Meliputi efektivitas koordinasi dan kerjasama antar lembaga yang terlibat dalam program Implementasi Kebijakan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan Di Desa Palimbangan Gusti Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara. Seberapa efektif koordinasi antar lembaga.

Hasil wawancara memuat hasil kurang terimplementasi hal tersebut ditunjukkan adanya persepsi yang beragam mengenai efektivitas koordinasi dalam Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Palimbangan Gusti. Meskipun beberapa pihak menilai koordinasi berjalan baik, banyak juga yang mengungkapkan adanya kendala signifikan. Kendala tersebut meliputi kurangnya komunikasi dan transparansi antar organisasi, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab, kekurangan forum koordinasi yang melibatkan semua pihak, serta proses pengambilan keputusan yang lambat.

Kesimpulan dari observasi dan wawancara terkait pelaksanaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) di Desa Palimbangan Gusti menunjukkan hasil yang kurang terimplentasi, baik berdasarkan observasi maupun wawancara. Observasi menunjukkan kurangnya koordinasi antar organisasi dalam program, sementara wawancara mengungkap berbagai kendala koordinasi seperti kurangnya komunikasi, ketidakjelasan peran, dan proses pengambilan keputusan yang lambat. melalui mekanisme yang lebih terstruktur, transparan, dan partisipatif, melibatkan semua pemangku kepentingan dan memastikan penyampaian informasi yang efektif kepada seluruh lapisan masyarakat.

b. Komunikasi Antar Petugas Dengan Masyarakat

Meliputi metode komunikasi yang digunakan, frekuensi komunikasi, dan efektivitas komunikasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Seberapa efektif komunikasi antara petugas dan masyarakat.

Hasil wawancara menunjukkan komunikasi antara petugas dan masyarakat dalam program Stop BABS di Desa Palimbangan Gusti masih kurang terimplementasi. Meskipun beberapa pihak menilai komunikasi berjalan baik, banyak yang mengungkapkan kendala jarang adanya pertemuan rutin, dan kurangnya pendekatan langsung dari petugas kepada warga. Hal ini menyebabkan pemahaman masyarakat terhadap program menjadi terbatas dan berdampak pada partisipasi yang kurang terimplemntasi Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan strategi komunikasi yang lebih komprehensif, terencana, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kesimpulan hasil terkait observasi maupun wawancara menunjukkan bahwa program Stop BABS di Desa Palimbangan Gusti masih kurang terimplementasi karena kurangnya komunikasi efektif antara dinas terkait dan masyarakat. Untuk penjelasan yang lebih mendalam masih kurang, sehingga untuk pemahaman masyarakat itu sendiri masih kurang untuk di tingkatkan.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Variabel ini mengkaji pengaruh faktor ekonomi, sosial, dan politik terhadap keberhasilan program Implementasi Kebijakan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan Di Desa Palimbangan Gusti Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara

a. Dukungan Lingkungan Sosial

Meliputi norma sosial, kebiasaan, dan kepercayaan masyarakat yang mempengaruhi perilaku buang air besar. Bagaimana norma sosial dan kebiasaan masyarakat mempengaruhi program Implementasi Kebijakan Gerakan Stop Buang Air Besar

Sembarangan Di Desa Palimbangan Gusti Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan yang dilakukan dilapangan terkait lingkungan sosial dari pelaksanaan kebijakan tersebut, mereka menyatakan bahwa dukungan lingkungan sosial masyarakat terhadap kebijakan ini masih kurang terimplementasi dan masih rendah dari tingkat partisiasi masyarakatnya. Karena melihat di Desa-desa kebanyakannya masih menggunakan jamban, karena seharusnya idealnya seperti di Kota untuk penggunaan jamban sudah harus ditiadakan dan bangunan nyapun harus dihilangkan, tapi melihat di Desa kebanyakannya masih menggunakan jamban, dan termasuk sulit untuk merubah kebiasaan tersebut karena masyarakat yang masih MCK (Mandi, Cuci, Kakus) disungai dengan adanya kebijakan ini sekiranya agar kebiasaan tersebut benar-benar berhenti dan masyarakat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan dapat disimpulkan bahwa mengenai dukungan lingkungan sosial pengimplementasian pelaksanaan kebijakan ini masih kurang terimplementasi dan masih rendah dari tingkat partisipasi masyarakatnya, yang mana masyarakatnya masih MCK (Mandi, Cuci, Kakus) disungai dan kebanyakannya dari masyarakat masih menggunakan jamban. Karena seharusnya idealnya seperti di Kota untuk penggunaan jamban sudah harus ditiadakan dan bangunannyapun harus dihilangkan, tapi melihat di Desa kebanyakannya masih menggunakan jamban.

b. Dukungan Lingkungan Sosial

Meliputi ketersediaan pekerjaan, pendapatan masyarakat, dan akses terhadap sumber daya ekonomi yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat mempengaruhi program Implementasi Kebijakan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan Di Desa Palimbangan Gusti Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Hasil wawancara peneliti dengan informan yang di lakukan di lapangan terkait lingkungan ekonomi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, mereka menyatakan bahwa dukungan lingkungan ekonomi masyarakat terhadap kebijakan ini kurang terimplementasi. Untuk sarana memang sudah sebagian di sediakan pemerintah akan tetapi jika ada sarana yang masih kurang masyarakat harus menambah bahan material lagi dan untuk biaya upah tukang atau buruh yang pembangunan wc tersebut belum tersedia.

Kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang di lakukan oleh peneliti di lapangan dapat di simpulkan bahwa mengenai dukungan lingkungan ekonomi pengimplementasian pelaksanaan kebijakan ini kurang terimplementasi melihat latar belakang mata pencaharian masyarakat di Desa Palimbangan Gusti mayoritas petani dan nelayan. Meskipun sarana sudah disediakan pemerintah tetapi jika ada sarana yang masih kurang masyarakat harus.

c. Dukungan Lingkungan Politik

Meliputi kebijakan pemerintah, dukungan politik, dan stabilitas politik yang dapat mempengaruhi keberhasilan program. Bagaimana dukungan politik dan stabilitas politik mempengaruhi program Implementasi Kebijakan Gerakan Stop Buang Air

Besar Sembarangan Di Desa Palimbangan Gusti Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Hasil dari wawancara yaitu cukup terimplementasi dengan menunjukkan dukungan lingkungan politik terhadap program Stop BABS di Desa Palimbangan Gusti bersifat beragam. Meskipun terdapat dukungan dari pemerintah desa melalui alokasi dana dan kerjasama dengan Puskesmas, tingkat dukungan dan prioritas program masih bervariasi. Beberapa pihak menilai dukungan politik sangat kuat dan efektif, sedangkan yang lain merasa dukungan masih kurang optimal karena kurangnya sosialisasi, prioritas pembangunan infrastruktur lain, dan keterbatasan fasilitas. Secara keseluruhan, terlihat adanya komitmen dari beberapa pihak untuk mendukung program ini, namun diperlukan peningkatan koordinasi, sosialisasi yang lebih intensif, dan alokasi sumber daya yang lebih memadai untuk mencapai tujuan program secara optimal.

Berdasarkan hasil dilakukan oleh peneliti di lapangan dapat di simpulkan bahwa wawancara dan observasi yang lingkungan politik untuk pengimplementasian pelaksanaan kebijakan ini cukup terimplementsi dan sangat mendukung untuk ke ikutsertaan peran pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan ini sangat berpengaruh penting bagi masyarakat dalam pencapaian kebijakan ini nantinya dalam pencapaian hidup bersih dan sehat.

B. Faktor- faktor yang memepengaruhi Implementasi Kebijakan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan Di Desa Palimbangan Gusti Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Faktor pendukung
   a. Terlaksanannya Kebijakan STOP BABS pada Masyarakat Desa Palimbangan Gusti untuk mengurangi Angka BABS yang Disosialisasikan Melalui Program Posyandu

      Berdasarkan hasil observasi dan wawancara maka faktor pendukung Implementasi Kebijakan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan Di Desa Palimbangan Gusti Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu dikarenakan Terlaksanannya Kebijakan STOP BABS pada Masyarakat Desa Palimbangan Gusti untuk mengurangi Angka BABS yang Disosialisasikan Melalui Program Posyandu.
2. Faktor penghambat
   a. Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat

      Berdasarkan hasil observasi dan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat Implementasi Kebijakan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan Di Desa Palimbangan Gusti Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Rendahnya partisipasi masyarakat tentang program Stop BABS.
   b. Kurangnya Pelatihan Lanjutan dan Pendalaman Materi Bagi Petugas

      Kesimpulannya, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa upaya penanggulangan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) kurangnya pelatihan lanjutan dan pendalaman materi bagi petugas lapangan menjadi faktor yang sangat mempengaruhi implementasi kebijakan ini . Meskipun jumlah petugas secara umum dinilai mencukupi, terdapat kendala dalam kinerja yang belum merata, dengan beberapa petugas yang kurang aktif dan proaktif. Hal ini menunjukkan bahwa

meskipun terdapat semangat gotong royong di antara masyarakat, kesenjangan dalam pelaksanaan program dan komitmen petugas masih perlu diperbaiki.

c. Tidak Ada Penegakan Sanksi Yang Tegas Terhadap Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang di lakukan oleh peneliti di lapangan dapat di simpulkan bahwa mengenai tidak ada penegakan sanksi yang tegas dalam pengimplementasian Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Palimbangan Gusti Kecamatan Haur Gading. salah satu faktor yang sangat mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Sekiranya penegakan sanksi yang tegas dapat di terapkan agar menuju perilaku yang bersih dan sehat.

d. Tingkat Kecukuan Ekonomi Yang Berbeda

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang di lakukan oleh peneliti di lapangan dapat di simpulkan bahwa mengenai kondisi lingkungan ekonomi dalam pengimplementasian kebijakan stop BABS di Desa Palimbangan Gusti.

e. Kurangnya Sarana dan Prasarana Ynag Diberikan Kepada Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang di lakukan oleh peneliti di lapangan dapat di simpulkan bahwa mengenai sarana dan prasarana dalam pengimplementasian pelaksanaan kebijakan ini belum memadai. Karena untuk membangun we selain harus menambah sarana yang masih kurang masyarakat juga harus menyediakan upah buruh untuk pembangunan we tersebut.

SIMPULAN

Implementasi Kebijakan Gerakan Stop Buang air Besar Sembarangan Di Desa Palimbangan Gusti Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu sungai utara belum terimplementasikan dengan baik. Dari enam variabel implementasi kebijakan menurut teori Donald Van Meter & Carl Van Horn (Leo Agustino, 2016: 133-136), terdapat 13 indikator yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan meliputi dua indikator: Ukuran Kebijakan dalam aspek cukupan wilayah, target populasi, dan jangka waktu cukup terimplementasi realistis dengan sosio kultur tingkat pelaksana kebijakan, indikator selanjutnya Tujuan Kebijakan dalam persentase penurunan BABS dan perbaikan Kesehatan masyarakat cukup terimplementasi dengan sosio kultur. Sumber Daya meliputi dua indikator: Sunber Daya Manusia yang kurang terimplementasi. Meskipun jumlah petugas dinilai mencukupi secara umum, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Indikator selanjutnya Sumber Daya Finansial Kurang terimplementasi di lihat dari segi anggaran yang tersedia untuk Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Palimbangan Gusti sangat terbatas dan tidak mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat. Dana tambahan sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan ini secara menyeluruh. Karekteristik Agen pelaksana meliputi dua indikator: Organisasi Formal kurang terimplementasi karena tidak adanya organisasi formal yang terstruktur, indikator selanjutnya Organisasi informal cukup terimplementasi, mereka menyatakan bahwa belum ada keterlibatan organisasi informal pelaksana kebijakan ini namun organisasi pemuda dalam mendukung Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Palimbangan Gusti. Sikap dan Kecendrongan (disposition) para pelaksana meliputi dua indikator: Penerima dari Pelaksana cukup terimplementasi dengan baik dari respon pelaksana itu sendiri, banyak dari pelaksana yang mendukung terlaksananya kebijakan ini, indikator selanjutnya penerima dari masyarakat kurang terimplementasi dalam berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan ini. peneliti melihat, masyarakat memang menerima dan mendukung tetapi untuk melaksanakan kebijakan ini

masyarakat masih rendah tingkat kesadaran dan kurang ikut serta sehingga mengakibatkan daya dukung dari Masyarakat masih lemah. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana meliputi dua indikator: Koordinasi antar Organisasi kurang terimplementasi. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya koordinasi yang efektif antar berbagai organisasi dan lembaga terkait, indikator selanjutnya Komunikasi antar Petugas dan Masyarakat masih kurang terimplementasi karena kurangnya komunikasi efektif antara dinas terkait dan masyarakat. Untuk penjelasan yang lebih mendalam masih kurang, sehingga untuk pemahaman masyarakat itu sendiri masih kurang untuk di tingkatkan. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik meliputi tiga indikator: Lingkungan Sosial yaitu dukungan lingkungan sosial kurang terimplementasi dan masih rendah dari tingkat partisipasi masyarakatnya, indikator selanjutnya Lingkungan Ekonomi yaitu dukungan lingkungan ekonomi kurang terimplementasi hal tersebut karena melihat dari segi pekerjaan masyarakat masih belum mencukupi dan belum memadai terhadap program Stop BABS, dan indikator selanjutnya Lingkungan Politik yaitu dukungan dari lingkungan politik cukup terimplementasi dengan menunjukkan gambaran yang kompleks mengenai dukungan lingkungan politik terhadap program Stop BABS di Desa Palimbangan Gusti. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Palimbangan Kecamatan haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi: Ada faktor pendorong yang terdiri dari a). Terlaksanannya Kebijakan STOP BABS pada Masyarakat Desa Palimbangan Gusti untuk mengurangi Angka BABS yang Disosialisasikan Melalui Program Posyandu. Ada faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan meliputi: a). Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, b) Kurangnya Pelatihan Lanjutan dan Pendalaman Materi bagi Petugas, c) Tidak ada penegakan sanksi yang tegas terhadap masyarakat, d). Tingkat Kecukupan Ekonomi yang Berbeda, e). Kurangnya Sarana dan Prasarana yang di berikan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Affrian, R. and Jumaidi, J. (2025) ‘Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah’, *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 9(1), pp. 109–126.

Agustino, L. (2016) *Dasar-dasar Kebijakan Publik. Edisi Revisi*. Bandung: CV Alfabeta.

Hidayatullah, G.M. and Mahpuzah, A. (2025) ‘Pengelolaan Pasar Mebel Muara Tapus pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Administraus*, 9(2), pp. 26–33.

Maria, S., Muaja, O.R.P. and Sumampouw, O.J. (2020) ‘Peran pemerintah dalam implementasi program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat stop buang air besar sembarangan’, *Journal of Public Health and Community Medicine*, 1(3), pp. 2721–9941.

Noorrahman, M.F. (2020) ‘Efektivitas program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui gerakan stop buang air besar sembarangan (BABS) di Desa Pawalutan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara’.

Setiawan, I. (2025) ‘Fenomena Penggunaan Sepeda Listrikdi Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Jurnal Niara*, 18(1), pp. 323–327.

Sugiyono (2022) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.